



JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH

Media Referensi
Daerah Membangun

VOL I | EDISI I | TAHUN 2013

PEMEKARAN DAERAH DAN PERKEMBANGAN
WILAYAH DI INDONESIA: KENAPA DOB MESTI
LAHIR PREMATUR?

Djoko Harmantyo

STRATEGI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN
PEMBANGUNAN TATA RUANG WILAYAH
BERBASIS AGROPOLITAN YANG CEPAT
TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Rusdiyanto

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH
PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK:
PERSPEKTIF PUBLIC RELATIONS

Aat Ruchiat Nugraha dan Trie Damayanti

REVITALISASI KOTA DAN KABUPATEN YANG
LEBIH BERKELANJUTAN: KERANGKA
KERJASAMA DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
DI BANGKALAN MADURA

Gunawan Tanuwidjaja dan Joyce Martha Widjaya

PEMANFAATAN MEDIA BARU DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Rulli Nasrullah

ISSN: 2337-3318

JURNAL
PEMBANGUNAN
DAERAH

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata
Jakarta Selatan 12750

Tahun 2013

Jurnal Pembangunan Daerah diterbitkan empat edisi dalam setahun oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan sebagai media referensi daerah membangun.

Jurnal ini kiranya berfungsi juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikan gagasan, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu pembangunan daerah dan desentralisasi.

Dewan Redaksi

PELINDUNG	: Menteri Dalam Negeri
PENANGGUNGJAWAB	: Dr. H. Muh. Marwan, M.Si
KETUA DEWAN REDAKSI	: Dr. Drs. Sjojfan Bakar, M.Sc
ANGGOTA	: Hasiholan Pasaribu, SE., MPKP Drs. Binar Ginting, MM Edi Sugiharto, SH., M.Si Widodo Sigit Pudjianto, SH., MH Ir. Dadang Sumantri Muchtar
REDAKTUR UTAMA	: Drs. A. Damenta, Mag.rer.publ
REDAKTUR PELAKSANA	: Fitriani, STP., MT., M.Sc
EDITOR	: Ahmad Anshori Wahdy, SE., MBA Emile Boeky, ST., M.Si Nita Sosiawati, ST., MT Muhammad Nur Fajar Asmar, S.STP Dede Sulaeman, S.Pdl Azwar, S.S., M.Si
MITRA BESTARI	: Achmad Adhitya, M.Sc., Ph.D Dr. Rulli Nasrullah, M.Si
DESAINER GRAFIS	: Deni Irawan, S.IKom
ALAMAT REDAKSI	: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp.: 021-7992537 Email: jurnalbangda@gmail.com

Pengantar Redaksi

Pemekaran daerah di Indonesia (sejak 1999-2010) serupa sel kanker yang membelah diri dengan sangat cepat. Setiap tahunnya rata-rata telah terbentuk 20 daerah otonom baru (DOB) hasil dari pemekaran daerah. Begitu banyaknya DOB yang terbentuk dalam era otonomi daerah selama ini berakibat pada bermunculannya berbagai persoalan yang rumit.

Secara umum, pemekaran wilayah tersebut belum bisa dikatakan berhasil, apalagi mampu menyejahterakan masyarakatnya. Sebaliknya, pemekaran wilayah yang seperti cendawan di musim hujan itu malah menimbulkan masalah yang tidak lagi sederhana. Misalnya, masalah penggunaan anggaran yang begitu besar dan meningkatnya konflik yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Salah satu bentuk konflik tersebut adalah terjadinya perebutan sumberdaya di perbatasan atau disebut sebagai konflik batas wilayah.

Seperti apa sisik-melik soal DOB tersebut? Djoko Harmantyo, Staf Pengajar dan Kepala Laboratorium Pengembangan Wilayah Departemen Geografi FMIPA-UI, membahas konsep dan teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam artikel berjudul, *Pemekaran Daerah dan Perkembangan Wilayah di Indonesia: Kenapa DOB Mesti Lahir Prematur*, beliau membahas perkembangan wilayah administrasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2012. Selain itu, dibahas pula instrumen pemekaran daerah yang berkaitan dengan potensi terjadinya konflik kewilayahan.

Dalam artikel kedua, Rusdiyanto, Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Madiun mengulas strategi percepatan dan pemanfaatan pembangunan tata ruang wilayah berbasis agropolitan. Menurutnya pembangunan tata ruang agropolitan merupakan strategi alternatif dalam memberikan solusi terhadap sumber penghidupan dan kesejahteraan, karena terdapat faktor fungsional dari berbagai sektor pertanian, industri, pariwisata dan agribisnis. Sehingga tata ruang agropolitan merupakan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi maupun pengendalian agar pembangunan berorientasi cepat tumbuh dan berkelanjutan. Artikelnya berjudul, *Strategi Percepatan dan*

Pemanfaatan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berbasis Agropolitan yang Cepat Tumbuh dan Berkelanjutan.

Artikel ketiga, Aat Ruchiat Nugraha dan Trie Damayanti, keduanya Dosen Jurusan Humas Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran memaparkan masalah pelayanan informasi publik oleh pemerintah daerah dengan pendekatan teori *Public Relations*. Secara khusus, kajian keduanya mengulas masalah tersebut dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Artikelnya berjudul, *Pelayanan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Perspektif Public Relations (Studi Kasus di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung)*.

Dalam artikel keempat, Gunawan Tanuwidjaja, Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Petra, Surabaya, mengkaji kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif daerah Bangkalan, Madura. Dalam kajian tersebut beliau mengusulkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan revitalisasi rencana tata ruang kabupaten-kabupaten di Madura dan beberapa usulan penting lainnya. Artikelnya berjudul, *Revitalisasi Kota dan Kabupaten yang Lebih Berkelanjutan: Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif di Bangkalan, Madura*.

Dalam artikel kelima, Rulli Nasrullah, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi (LPSI) Jakarta, membahas penggunaan media baru dalam menunjang pembangunan daerah. Menurutnya, salah satu keuntungan pemanfaatan media baru itu adalah cara kerja yang lebih praktis, menghemat waktu, bahkan mengatasi persoalan tempat. Baginya, penyebaran informasi menggunakan media baru menjadi kekuatan baru, misalnya, dalam menyebarkan informasi terkait potensi daerah sehingga memberikan peluang bagi investasi daerah untuk bisa ikut andil di suatu daerah secara cepat. Artikelnya berjudul, *Pemanfaatan Media Baru dalam Pembangunan Daerah.*[]

Daftar Isi

PENGANTAR REDAKSI	i-ii
DAFTAR ISI	iii
PEMEKARAN DAERAH DAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA: KENAPA DOB MESTI LAHIR PREMATUR? Oleh: Djoko Harmantyo	1
STRATEGI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN TATA RUANG WILAYAH BERBASIS AGROPOLITANYANG CEPAT TUMBUH DAN BERKELANJUTAN Oleh: Rusdiyanto	13
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: PERSPEKTIF PUBLIC RELATIONS Oleh: Aat Ruchiat Nugraha dan Trie Damayanti	35
REVITALISASI KOTA DAN KABUPATEN YANG LEBIH BERKELANJUTAN: KERANGKA KERJASAMA DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI BANGKALAN MADURA Oleh: Gunawan Tanuwidjaja dan Joyce Martha Widjaya	59
PEMANFAATAN MEDIA BARU DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Oleh: Rulli Nasrullah	77

Revitalisasi Kota dan Kabupaten Yang Lebih Berkelanjutan: Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif di Bangkalan, Madura

Gunawan Tanuwidjaja dan Joyce Martha Widjaya

Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Petra, Surabaya, dan Peneliti Senior Balai Sosial Ekonomi Lingkungan Jalan dan Jembatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum
Email: gunte@peter.petra.ac.id, guneitb@yahoo.com

Abstract

Madura has limited social, economical and environmental resources which make it underdeveloped compared to the rest regions in the East Java. This situation requires the implementation of a more comprehensible participative planning and cooperation in order to enhance sustainable development, particularly in Bangkalan Regency. The study reveals that Bangkalan has a unique social and economic character as well as natural resources; majority of residents with low level of education, most of them are also live in poverty, frequent social conflict, not to mention limited natural resources. The study offers some recommendations to revitalize district spatial planning. It also proposes a mechanism to increase public participation in planning, land acquisition, construction, operation, and maintaining infrastructures. Furthermore, the study also recommends the improvement road infrastructures, water installation and its distribution in Madura. All those strategies should be implemented hand in hand with the effort to strengthen participative approach of development both in planning and cooperation.

Abstrak

Pulau Madura memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terbatas sehingga tertinggal dari kawasan lainnya di Jawa Timur. Ketertinggalan ini menuntut diterapkannya kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif yang lebih jelas untuk mewujudkan pembangunan pulau Madura yang berkelanjutan, terutama di Kabupaten Bangkalan. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Kabupaten Bangkalan, Madura ternyata memiliki karakter sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik, misalnya: pendidikan penduduk Bangkalan yang terbatas, sebagian besar penduduk Bangkalan hidup di bawah garis kemiskinan, konflik sosial yang sangat sering terjadi; dan sumber daya alamnya sangat terbatas. Dalam kajian ini diusulkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan revitalisasi rencana tata ruang kabupaten di Madura. Kemudian diusulkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, diusulkan pula peningkatan infrastruktur jalan dan instalasi air baku serta distribusinya di Madura. Strategi ini diusulkan bersamaan dengan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif.

Kata kunci: Madura, kerjasama partisipatif, pembangunan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pulau Madura memiliki luas 5.304 km² dan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terbatas. Hal ini menyebabkan Pulau Madura tertinggal dari kawasan lainnya di Jawa Timur (Moh. Adib, 2009). Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Prestasi Manusia (IPM) keempat Kabupaten di Pulau Madura yang relatif di bawah kota-kota dan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik-BAPENAS-UNDP, 2004).

Ketertinggalan ini mendorong diterapkannya strategi pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) oleh pemerintah pusat yang dibangun antara 2003-2009, dengan panjang keseluruhan 5.7 km. Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat menyiapkan instrumen-instrumen lainnya seperti usulan Rencana Tata Ruang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (RTR KKJS) dan usulan rencana tata ruang kabupaten-kabupaten di Madura.

Dalam usulan rencana tata ruang kabupaten-kabupaten tersebut, Kabupaten Bangkalan direncanakan menjadi kawasan industri terpadu (industri, logistik, dan pelabuhan). Diusulkan pula, untuk dibuat daerah-daerah pertanian terpadu (agropolitan) di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang akan menunjang bahan baku kawasan industri. Sehingga diharapkan terjadi kerjasama antardaerah untuk membangun pulau Madura ini.

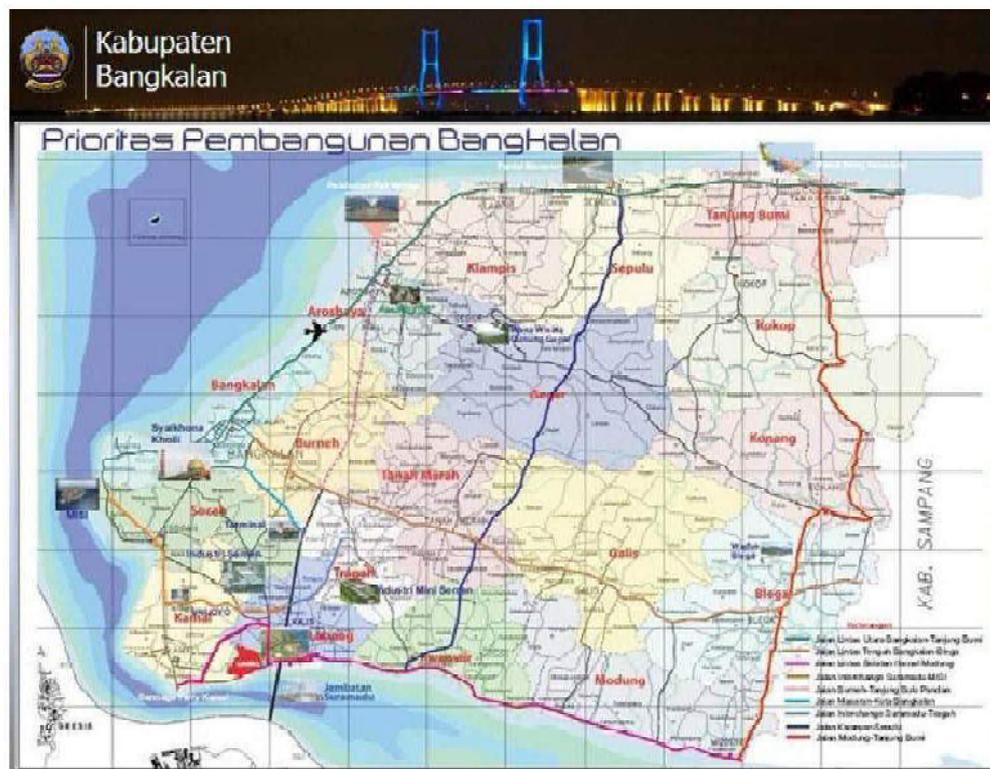
Perbedaan juga terdapat pada usulan

mengenai kawasan industri. Pemerintah pusat mengusulkan kawasan industri di Bangkalan adalah kawasan industri berbasis pertanian dan kawasan pelabuhan peti kemas Klampis. Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan mengusulkan seperti kawasan agropolitan di Bangkalan; *Madura Industry and Seaport City (MISI)* di Socah; serta Industri Semen di Socah dan Tragah. Pola pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dan Bappeda Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan usulan pengembangan Bangkalan tidak selaras.

Selain itu, pemerintah pusat juga mempersiapkan strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPPWS) untuk mengelola Jembatan Suramadu dan Kawasan Kaki-Kaki Jembatan Suramadu.

Tapi ternyata Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) ini belum bisa terwujud secara optimal karena konflik kepentingan antara Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPPWS) dan pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bangkalan.

Karena itu diperlukan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif yang lebih jelas untuk mewujudkan pembangunan pulau Madura yang berkelanjutan, terutama di Kabupaten Bangkalan. Kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif ini secara ideal harus melibatkan pemerintah



Gambar 1. Pola Pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan

(pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan), swasta dan masyarakat. Usulan ini selaras dengan dasar teori pembangunan berkelanjutan.

Sebagai sebuah rumusan, kajian ini difokuskan dalam dua masalah penting: apakah ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif di Bangkalan? Dan bagaimana memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk mewujudkan kerjasama dan perencanaan partisipatif untuk rencana industrialisasi Bangkalan?

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk beberapa hal. *Pertama*, memetakan

potensi dan kendala sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kerjasama dan perencanaan partisipatif. *Kedua*, menyusun usulan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif untuk revitalisasi kota dan kabupaten. *Ketiga*, memberikan saran-saran strategi secara kualitatif untuk pembangunan Madura yang berkelanjutan secara umum.

Kemudian, manfaat dari kajian ini adalah terwujudnya "Pembangunan Berkelanjutan" atau "*Sustainable Development*" di Pulau Madura, terutama di Kabupaten Bangkalan.

Metode Analisa *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT) atau analisis

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Start, D., et.al., 2004) digunakan dalam analisis faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian data ini diolah lebih lanjut dengan Metode Visual (Sanoff, H., 1991) dan *Geographic Information System* (GIS) (Tanuwidjaja, G. dan Malone-Lee, 2009) untuk mendapatkan strategi pembangunan berkelanjutan di Bangkalan.

Langkah-langkah penting yang perlu dijelaskan ialah verifikasi berbagai fenomena konflik sosial, ekonomi, dan rencana yang ada di lapangan dilakukan oleh tim Puslibang Sosekling ke Bangkalan dengan metode *Visual Research* Sanoff (1991).

Juga dilakukan diskusi dengan para ahli dan diskusi stakeholders untuk membahas kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif. *Stakeholders* yang terlibat di antaranya ialah Balai V Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPPWS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan, pada 2010.

Tinjauan Teoritis

Pembangunan Berkelanjutan dijelaskan dalam Laporan "*the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*" pada 1987. Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987).

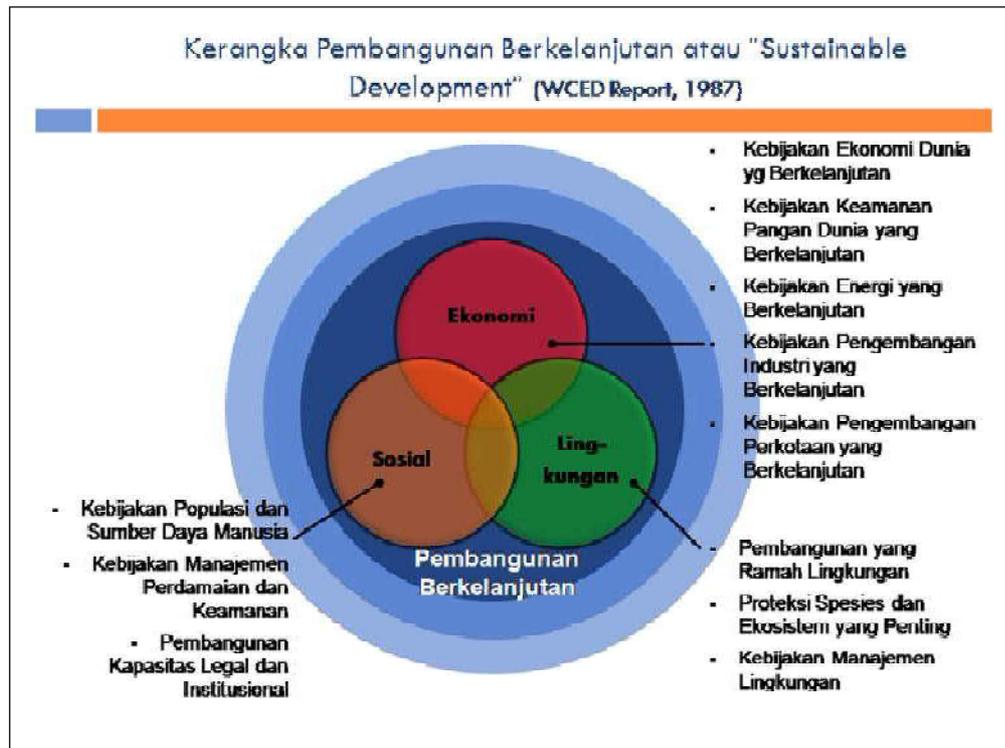
Pembangunan berkelanjutan secara ideal

harus melingkupi seluruh negara dengan sebuah rencana strategi untuk transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Strategi di atas terutama sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan akses kepada sumber daya alam dan pemerataan keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Sehingga seharusnya masyarakat miskin dan pemenuhan kebutuhannya harus diperhatikan dalam sebuah pembangunan berkelanjutan.

Sayang sekali, kerangka pembangunan berkelanjutan ini sangat berlawanan dengan kondisi negara berkembang seperti Indonesia, khususnya pulau Madura. Todaro, M.P., Smith, S.C., ed. (2003) mengungkapkan berbagai fenomena pembangunan di negara berkembang, seperti:

- Rendahnya level kesejahteraan, ditandai dengan pendapatan yang rendah, ketidakmerataan kesejahteraan, kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang tidak memadai;
- Produktivitas yang rendah;
- Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat ketergantungan yang tinggi;
- Ketergantungan pada ekspor produksi pertanian dan produksi primer;
- Pasar yang tidak sempurna dan pembatasan informasi;
- Dominasi ketergantungan dan kerentanan di dalam hubungan relasi internasional.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan itu, Todaro, M.P., Smith,



Gambar 2. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan atau "Sustainable Development."
Sumber: WCED (1987).¹⁵

S.C., ed. (2003) mengusulkan 3 tujuan dari pembangunan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, untuk meningkatkan ketersediaan dan melebarkan distribusi dari kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.

Kedua, untuk meningkatkan level kehidupan termasuk pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, yang bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan tapi juga menimbulkan kepercayaan diri secara individu dan nasional.

Ketiga, untuk memperluas pilihan-pilihan

ekonomi dan sosial bagi individu-individu dan bangsa-bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan dari orang lain dan negara lain, serta membebaskan dari pengabaian dan kesengsaraan.

Sehingga rencana pembangunan kota dan kabupaten harus memerhatikan tujuan-tujuan tersebut. Sebaliknya, selama ini pembangunan di Indonesia hanya berpusat pada masalah fisik. Karena itu dibutuhkan perubahan paradigma semua pihak yang berkepentingan di kota dan kabupaten tentang pembangunan berkelanjutan.

Teori pembangunan berkelanjutan di kota-kota juga diungkapkan oleh Jane Jacobs

(1961). Ia berpendapat bahwa kota-kota adalah organisme hidup dan ekosistem yang berkembang seiring dengan waktu dan interaksinya dengan penduduknya. Elemen-elemen kota, seperti tempat pejalan kaki, taman-taman, permukiman-permukiman, pemerintah dan sektor ekonomi harus berfungsi sinergis.

Jane Jacobs (1961) menyarankan perkembangan kota secara campuran (*mixed-use urban development*) yang diintegrasikan dari berbagai tipe bangunan dan penggunaan, perumahan atau komersial, baru atau lama. Menurutnya, kota-kota akan bergantung pada keragaman tata guna lahan, juga keragaman penduduk yang menggunakannya (usia, waktu penggunaan) sehingga tercipta kehidupan komunitas. Menurutnya, "organik, spontan, dan tidak rapih" (*organic, spontaneous, and untidy*) akan menyebabkan keberlanjutan dari kota.

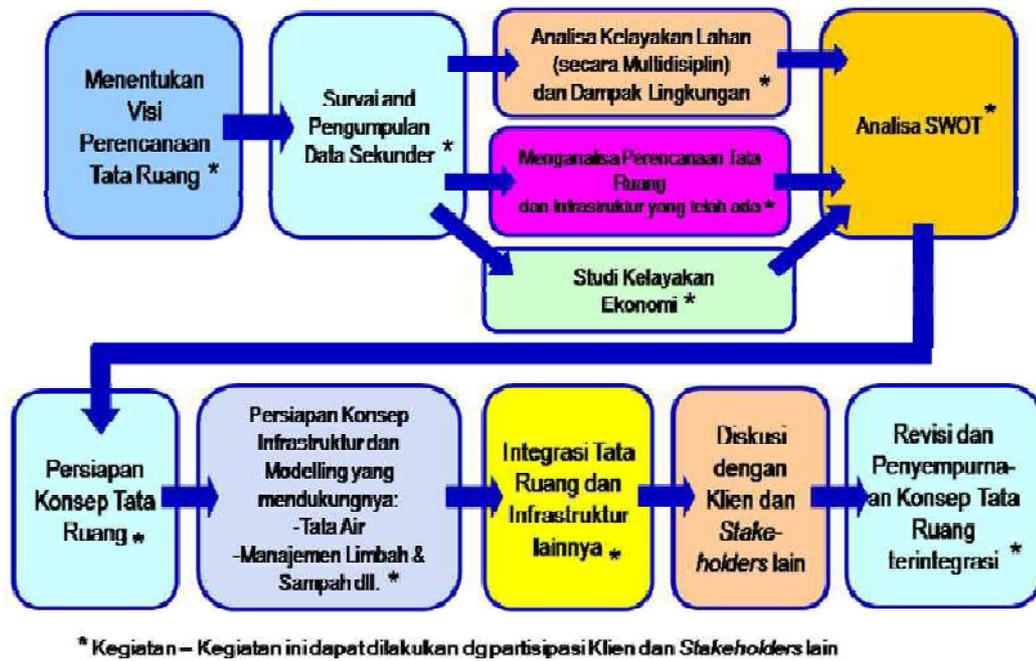
Terakhir ia juga menyarankan dilakukannya proses perencanaan berbasis komunitas yang mengutamakan masukan dari bawah (*Bottom-Up Community Planning*). Menurutnya pengetahuan mengenai masalah lokal akan berdampak baik pada pengembangan masyarakat (*community development*). Hal ini berdasarkan pengalamannya bahwa kebijakan perencanaan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan fungsi permukiman-permukiman dalam kota tersebut (Jane Jacobs, 1961).

Newman dan Kenworthy (2000), dalam *Sustainable Urban Form: The Big Picture* mengusulkan empat strategi untuk mengubah kota yang berbasis kendaraan,

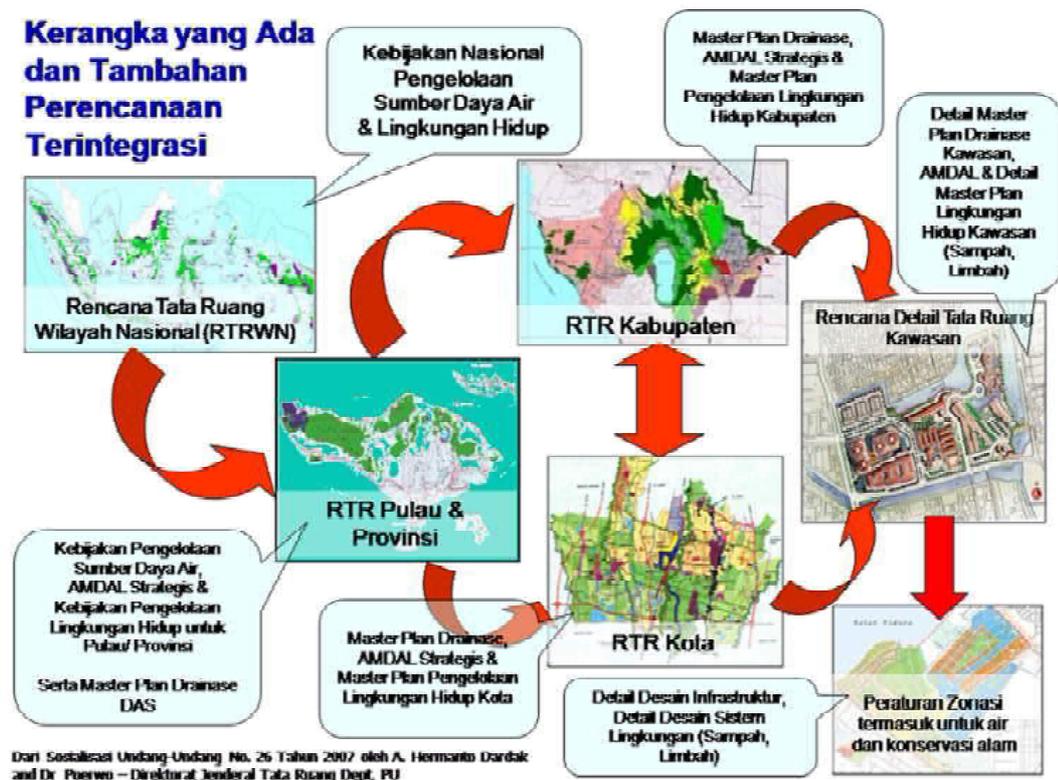
menjadi kota yang berkelanjutan (*Sustainable City*), yaitu: Revitalisasi bagian dalam kota (*Revitalize the inner city*); Memfokuskan pembangunan pada jalur kereta api yang telah dibangun (*Focus development around the existing rail system*); Tidak mendukung penyebaran perkotaan (*Discourage further urban sprawl*); dan Memperpanjang jaringan perhubungan publik sampai pedesaan (*Extend the public transport system and build new urban villages in the suburbs*).

Upaya yang disarankan tersebut sudah berhasil diterapkan di Inggris sehingga mengurangi lahan dalam kota yang diabaikan, dan menyebabkan pusat-pusat lokal tersebut menjadi lebih baik, hidup, dan menarik untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut (Williams, 2000).

Untuk kawasan kota dan kabupaten yang berasal dari lahan kosong maka diperlukan juga perencanaan tata ruang komprehensif berbasis ekologis, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati (kondisi ekologi), kapasitas atau daya dukung lingkungan (kondisi fisik lainnya) serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi massal, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*) dalam penentuan tata ruang tersebut. (Tanuwidjaja, Widjaya, 2010 dan Tanuwidjaja, Malone-Lee, 2009). Lihat Gambar 3 dan 4.



Gambar 3. Metode Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis



Gambar 4. Integrasi Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis

Merangkum teori tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan sebuah kerangka pembangunan berkelanjutan di kota atau kabupaten di Indonesia yang memerhatikan kondisi sosial ekonomi lingkungan yang ada. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menerapkan perencanaan partisipatif dan langkah-langkah pembangunan selanjutnya.

Selain itu dilakukan tinjauan pada Departemen Pekerjaan Umum (1998), Pedoman Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Umum (PSD-PU) yang dilaksanakan pada 1996-1998 di Kota Bandung, Kelurahan Cibangkong, dan Kelurahan Taman Sari. Dalam studi kasus ini terlihat bahwa pembangunan sarana dan prasarana umum pekerjaan umum yang direncanakan dan dibuat bersama warga masyarakat akan berdampak positif. Dampaknya ialah akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan.

Departemen Pekerjaan Umum (1998) juga merekomendasikan konsep dasar TRIDAYA yang terdiri dari 3 (tiga) Daya, meliputi pemberdayaan sosial, pendayagunaan prasarana dan sarana, serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Didapati juga azas, prinsip pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan PSD-PU yang menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif.

Azas-azas yang penting tersebut antara

lain: Pertama, azas demokratis, yang berarti segala pengambilan keputusan didasarkan atas aspirasi bersama dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh pelaku pembangunan tanpa adanya tekanan dan paksaan.

Kedua, azas keadilan, yang berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Ketiga, azas kooperatif (kerjasama), yang berarti dalam pelibatan antarpelaku, hubungan yang dibangun menerapkan kesetaraan dan saling menguntungkan dan berbagai pelaku pembangunan yang terlibat.

Sementara itu prinsip-prinsip yang penting ialah: pelibatan antarpelaku, yang berarti adanya keterlibatan aktif semua unsur komunitas pemukim, antarkomunitas, maupun antarpelaku dalam setiap tahapan kegiatan; saling belajar, yang berarti dalam menjalankan aktivitas pada setiap tahapan kegiatan, hubungan antarpelaku merupakan proses saling belajar dan memahami dalam rangka saling mengembangkan; transparansi, yang berarti pada setiap kegiatan, disyaratkan adanya keterbukaan informasi tentang maksud dan tujuan, serta besaran kegiatan, secara vertikal maupun horizontal; dan akuntabel, yang berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan pada setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diungkapkan Todaro, M.P., Smith, S.C.,

ed. (2003) dan Azas dan Prinsip Program PSD-PU (1998) diadopsi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif.

Analisis Faktor-faktor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Terdapat beberapa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif. Dari analisis yang telah dilakukan ditemui beberapa faktor inti yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya: status pendidikan; status kemiskinan; budaya demokrasi atau pengambilan keputusan; transparansi proses pembangunan dan pihak-pihak; akuntabilitas pihak-pihak; keadilan hukum; budaya kerjasama; konflik sosial; dan ketersediaan sumber daya (sumber daya air, daya dukung tanah, jaringan perhubungan, dan kesuburan tanah).

Kabupaten Bangkalan ternyata memiliki karakter sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik sebagaimana bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Status pendidikan. Penduduk Bangkalan rata-rata memiliki pendidikan yang terbatas;
2. Status kemiskinan. Penduduk Bangkalan cukup banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Budaya demokrasi atau pengambilan keputusan yang selama ini sangat bersifat *top-down* (kebijakan dari atas ke bawah);
4. Transparansi proses pembangunan dan pihak-pihak yang belum didapatkan informasi;
5. Akuntabilitas pihak-pihak yang belum didapatkan informasi;
6. Keadilan hukum yang belum didapatkan informasi;
7. Budaya kerjasama yang belum didapatkan informasi;
8. Konflik sosial yang terjadi sangat sering (dan menunjukkan faktor 4, 5, 6 tidak optimal sedangkan faktor 7 sudah meluntur);
9. Ketersediaan sumber daya yang sangat terbatas (sumber daya air sangat terbatas, daya dukung tanah kurang baik, jaringan perhubungan yang tidak memadai, dan kesuburan tanah sangat terbatas).

Faktor-faktor ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Untuk status pendidikan, mayoritas penduduk Bangkalan memiliki pendidikan yang terbatas. Sebanyak 42% penduduk merupakan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebaliknya hanya 2% penduduk yang merupakan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ini memperkuat data terbatasnya bahwa pendidikan mayoritas penduduk Bangkalan (BPS, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling). Kondisi ini diduga akan menyebabkan sulitnya pelibatan masyarakat karena kesulitan komunikasi. Lihat Tabel 1.

Mengenai status kemiskinan, mayoritas penduduk Bangkalan, hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena di Bangkalan, subsistemnya menggunakan pertanian tadah hujan (ladang atau tegalan),

Tabel 1. Jumlah Siswa SD & SMP dan Siswa SMA & SMK terhadap Total Penduduk Bangkalan tahun 2009 (Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling)³⁷

No	Nama Kota/ Kabupaten	Total Jumlah Penduduk	Jumlah Siswa SD & SMP	% Siswa SD & SMP dari Total Jumlah Penduduk	Jumlah Siswa SMA & SMK	% Siswa SMA & SMK dari Total Jumlah Penduduk
1	Kamal	47687	14638	31%	817	1.71%
2	Socah	57783	19537	34%	143	0.25%
3	Bangkalan	72309	24930	34%	6318	8.74%
5	Sepulu	44875	16662	37%	99	0.22%
4	Klampis	52812	19559	37%	110	0.21%
6	Burneh	59111	22562	38%	1320	2.23%
8	Modung	50001	20389	41%	1013	2.03%
7	Arosbaya	42802	17394	41%	1520	3.55%
9	Tragah	27500	11614	42%	433	1.57%
12	Tanjung Bumi	49262	21130	43%	595	1.21%
10	Kwanyar	46249	19660	43%	701	1.52%
13	Labang	36799	15847	43%	704	1.91%
11	Blega	60032	25677	43%	1065	1.77%
14	Geger	65166	28472	44%	179	0.27%
15	Galis	74068	33277	45%	278	0.38%
16	Tanah Merah	60838	28172	46%	155	0.25%
17	Kokop	64823	31450	49%	0	0.00%
18	Konang	44880	27968	62%	394	0.88%
	Total	956997	398938	42%	15844	2%



Gambar 5. Peta Distribusi Murid SD & SMP di Bangkalan terhadap Total Penduduk.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling

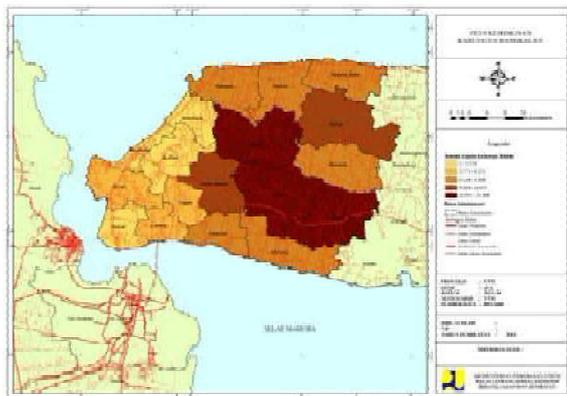


Gambar 6. Peta Distribusi SMA & SMK di Bangkalan terhadap Total Penduduk

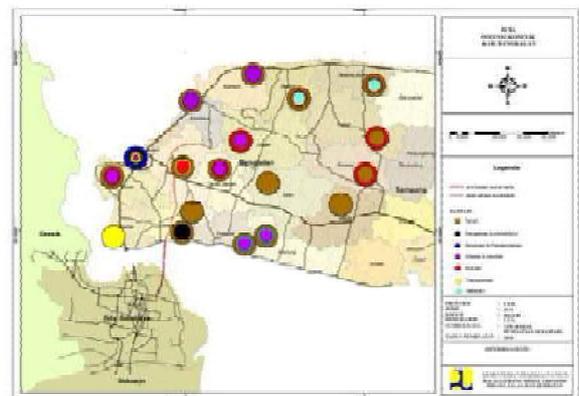
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling

Tabel 2. Data Kemiskinan per Kecamatan di Bangkalan (Jumlah Kepala Keluarga Miskin).
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, (2008-2009), diolah Tim Puslitbang Sosekling

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin per Kecamatan	Jumlah KK per Kecamatan	% KK Miskin dibandingkan dengan KK per Kecamatan
1	Bangkalan	2884	16762	17%
2	Arosbaya	2265	11042	21%
3	Bumeh	2942	12298	24%
4	Kamal	3270	10928	30%
5	Socah	5293	13202	40%
6	Tanjung Bumi	7958	13386	59%
7	Tragah	4317	7167	60%
8	Klampis	9064	14894	61%
9	Labang	6323	9963	63%
10	Kwanyar	8652	12742	68%
11	Tanah Merah	10421	14952	70%
12	Galis	12409	17686	70%
13	Sepulu	8373	11205	75%
14	Geger	12905	17136	75%
15	Modung	9106	11655	78%
16	Blega	11830	14594	81%
17	Kokop	10671	11994	89%
18	Konang	9264	10321	90%
	Total	137947	231927	59%



Gambar 7. Peta Distribusi Kemiskinan Bangkalan. Kecamatan Konang, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang paling miskin. Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling



Gambar 8. Peta Distribusi Konflik di Kabupaten Bangkalan. Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling

seperti temuan Moh. Adib (2009). Kemiskinan di sana juga ternyata menyebabkan konflik sosial, tingginya pengangguran, tingginya kriminalitas, tingginya migrasi keluar dari kawasan ini. Selain itu, hal ini juga menyebabkan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang tidak memadai. Lihat Tabel 2.

Konflik sosial di Madura, terutama Bangkalan, terjadi sangat sering. Konflik-konflik sosial yang ditemukan pada Penelitian Puslitbang Sosekling di antaranya ialah:

1. Konflik birokrasi pemerintahan di antaranya tumpang tindihnya kewenangan BPWS dan pemda Kabupaten Bangkalan. Hal ini mengakibatkan konflik di kawasan kaki-kaki jembatan Suramadu mengenai penataan pedagang kaki lima, pembagian retribusi Tol Suramadu. Selain itu terdapat komunikasi yang kurang baik antara birokrasi dengan masyarakat dan investor yang mengakibatkan sulitnya izin investasi;
2. Konflik tanah, di antaranya terkait penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan dan penggusuran makam leluhur. Selain itu terjadi pemalsuan sertifikat tanah dan spekulasi lahan;
3. Konflik wisata dan asusila terjadi karena ketidakjelasan aturan privatisasi pengelolaan wisata. Hal ini mengakibatkan konflik antara pihak swasta dan masyarakat, serta bermunculannya warung remang-remang yang menyajikan minuman keras;
4. Konflik industri dan pertambangan juga terjadi berupa penolakan dan perusakan fasilitas oleh Masyarakat terhadap pengeboran karena dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu juga terjadi konflik karena penjiplakan motif batik;
5. Konflik perhubungan di antaranya: ketidakjelasan atau perebutan trayek angkutan, penolakan masyarakat terhadap pembangunan terminal bus;
6. Konflik nelayan di antaranya: pertikaian nelayan, penolakan masyarakat terhadap Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Konflik-konflik di atas ternyata bermuara pada budaya demokrasi atau pengambilan keputusan yang bersifat *top-down*. Prinsip *top-down* yang dianut pada pembangunan di Pulau Madura rupanya merupakan warisan dari zaman kolonialisme Belanda. De Joonge (1988) melaporkan, Belanda memberikan wewenang raja-raja Madura untuk memungut pajak dan memerintah secara otonom. Hal ini menyebabkan raja-raja tersebut memungut upeti untuk Belanda dan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya praktik ini menyebabkan para petani harus membayar 1/3 atau 1/2 dari hasil panennya sebagai upeti hasil pertanian, pajak, pajak tanah dan kerja paksa. Para petani menjadi enggan memberikan hasil yang maksimal karena pajak ini, ditambah dengan kondisi pertanian yang bersifat subsistem. Selain itu pula dicatat bahwa petani enggan menggunakan sistem pengairan pada tegalan yang ada

karena tegalan yang diubah menjadi sawah akan disita oleh raja.

Pola *top-down* ini juga terjadi pada masa kemerdekaan. Edi Juwono Slamet (1999) melaporkan bahwa seringkali aparat pemerintah Indonesia melakukan pendekatan serupa dan menyebabkan gagalnya program-program pembangunan. Prinsip *top-down* ini juga terlihat pada konflik kepemilikan lahan di antaranya oleh Perusahaan Negara Garam di Madura (Moh Adib, 2009).

Sementara itu, data-data tentang transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak serta keadilan hukum dan budaya kerjasama belum didapat bukti-buktinya. Tetapi terlihat dari sejumlah konflik hal ini transparansi, akuntabilitas dan keadilan hukum tidak optimal. Sementara budaya kerjasama atau kegotong royongan diduga sudah meluntur.

Terakhir faktor keterbatasan sumber daya Kabupaten Bangkalan yang sangat terbatas akan diulas. Mengenai sumber daya air, didapati data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2008/2009 juga menyatakan bahwa curah hujan bulanan rata-rata bervariasi antara 0-276 mm/bulan. Hal ini berarti curah hujan yang ada tidak dapat menunjang kegiatan pertanian terutama antara Juni-September (BPS, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling).

Studi lain dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Studi Neraca Air SWS Madura (1995) memprediksikan bahwa rasio kebutuhan air terhadap ketersediaan air pada musim kemarau di tahun 2020 rata-rata akan

mencapai 80%. Artinya pasokan sumber daya air tidak akan memadai. Beberapa Sub-DAS bahkan mengalami defisit parah seperti Bangkalan (428%), Sabuntar (101%), dan Semajid (102%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan infrastruktur penyedia air jika Pulau Madura ini ingin dikembangkan sebagai industri atau pertanian.

Mengenai daya dukung tanah untuk pondasi bangunan, ditemukan bahwa terdapat lapisan geologi berupa Formasi Aluvial dan Formasi Madura yang mendominasi Pulau Madura kurang sesuai untuk industri karena lapisan ini memiliki potensi perosakan tanah. Pada Aluvial, perosakan tanah terjadi karena terdiri dari lempung, lanau lempungan, lanau dan pasir. Sedangkan pada Formasi Madura, potensi perosakan tanah bisa terjadi karena fenomena *karst* terbentuk dari batuan gamping yang juga muda runtuh. Terutama jika dilakukan penarikan air tanah berlebihan dan pembebanan tanah berlebihan (R. Soekardi Poespowardoyo dan Hendri Setiadi, 1985).

Jaringan perhubungan di Pulau Madura belum memadai untuk menunjang kawasan industri dan pertanian terpadu. Berdasarkan survey singkat, ditemukan banyak jalan provinsi dan kabupaten ternyata memiliki Daerah Milik Jalan (Damija) yang terlalu sempit. Akibatnya arus perhubungan darat menjadi lambat dan kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

Tentang kesuburan tanah, ditemukan terdapat jenis tanah *Latosol*, *Litosol*, *NCB Soil* dan *Regosol* di Bangkalan yang kurang sesuai

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> • Potensi pengembangan kegiatan ekonomi yang telah ada saat ini seperti: Pertanian (terutama jagung dan tembakau), Perikanan, dan Peternakan (terutama sapi). • Kebudayaan Madura yang positif di antaranya: ketaatan dalam beribadah dan menganut ajaran Islam, hormat, sopan dan solidaritas yang tinggi • Sikap masyarakat yang positif yaitu ulet dan tekun dalam merintis pekerjaan • Peran Perempuan Madura yang semakin penting dalam segi – segi kehidupan • Terdapatnya berbagai potensi kesenian yang unik seperti Kerapan Sapi, Batik Madura, Upacara Bersih Desa Upacara Perkawinan, Pakaian Adat Madura, 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan konektivitas jaringan jalan di Madura • Keterbatasan Sumber Daya Air • Jenis lahan yang relatif kurang subur • Kegiatan ekonomi (terutama pertanian) yang masih subsisten • Monopoli di bidang Ekonomi yang terjadi di Madura • Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat • Tingkat pendidikan masyarakat di Madura yang terbatas • Praktek pembangunan yang terlalu Top-Down • Terjadinya penolakan masyarakat terhadap perubahan • Trend perubahan sikap masyarakat yang tidak sesuai dengan tradisi dan tata nilai budaya masyarakat Madura. • Tradisi Carak (yg sebenarnya membela kehormatan) yang disalah-artikan dan meningkatkan potensi konflik
Opportunity (Kesempatan)	Threat (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya mobilitas dari Surabaya-Madura • Potensi menjadikan Madura Kawasan Ekonomi Khusus yang berbasis kepada “Industri dan Pelabuhan untuk Ekspor.” • Potensi pariwisata Madura yang dapat dikembangkan karena berdekatan dengan Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahalnya biaya operasi dan pemeliharaan Jembatan Suramadu karena ulah “oknum” • Pengembangan Madura, khususnya kawasan Suramadu menjadi tidak teratur dan tidak terkendali • Masuknya tenaga kerja dari daerah lain ke Madura • Terjadinya kecemburuan sosial karena perbedaan kondisi Surabaya dan Madura

Tabel 3. Hasil Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities and Threats) untuk Bangkalan, Madura

Threats	Strategi S-T (Menghadapi Ancaman)	Strategi W-T (Menghindari Ancaman)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Organisasi Masyarakat untuk membantu keamanan Jembatan Suramadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan Tokoh Ulama dalam melakukan kontrol sosial untuk aspek negatif dari pembangunan • Pembangunan Dalam Latihan Kerja
Opportunities	Strategi S-O (Eksplotasi Kekuatan)	Strategi W-O (Mencari Kelemahan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pertanian yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Agriculture</i>) • Pembangunan partisipatif dengan melibatkan Para Ulama dan memperhatikan budaya Madura, nilai – nilai Islami, hormat dan sopan santun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten – Kabupaten di Pulau Madura • Penyediaan Jalan & Sumber Daya Air terutama untuk Industri dan Pertanian dll. • Pengembangan Industri dan Logistik yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Industry</i>)
	Strengths	Weaknesses

Tabel 4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Madura dengan berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan

untuk pertanian, peternakan dan usaha kehutanan. *Pertama*, hal ini disebabkan oleh rendahnya kandungan mineral yang diperlukan oleh pertanian pada jenis tanah tersebut. *Kedua*, karena proses erosi dan pertanian yang kurang berkelanjutan di masa lalu. Hal ini menyebabkan subsistennya

pertanian di Madura dan perlunya rekayasa kesuburan tanah untuk kawasan pertanian (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian).

Dapat disimpulkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan Bangkalan Madura dapat dijelaskan pada tabel-tabel di atas.

Karena Tugas Pokok Instansi Balai Sosial Ekonomi Lingkungan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan (Balai Sosekling Jalan), Puslitbang Sosekling Departemen Pekerjaan Umum, maka diusulkan beberapa rekomendasi yang terkait. *Pertama*, revitalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten-kabupaten di Pulau Madura. *Kedua*, diusulkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Terakhir, diusulkan peningkatan infrastruktur jalan dan instalasi air baku dan distribusinya di Pulau Madura terutama untuk kawasan industri terpadu. Tetapi hal ini tidak mungkin diwujudkan tanpa kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif seperti dijelaskan sebagai berikut ini.

Usulan Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif

Dalam kerangka kerjasama untuk revitalisasi kota dan kabupaten ini diusulkan sebuah integrasi pendekatan baru pada kerangka perencanaan nasional sampai lokal yang selama ini dikenal sebagai Musyawarah Rembug Warga untuk pembangunan atau Musrebang.

Tiga langkah usulan yang baru ialah studi sosial ekonomi lingkungan; evaluasi kelayakan dan integrasi rencana pembangunan dalam perencanaan tata ruang serta forum diskusi penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang kota/kabupaten.

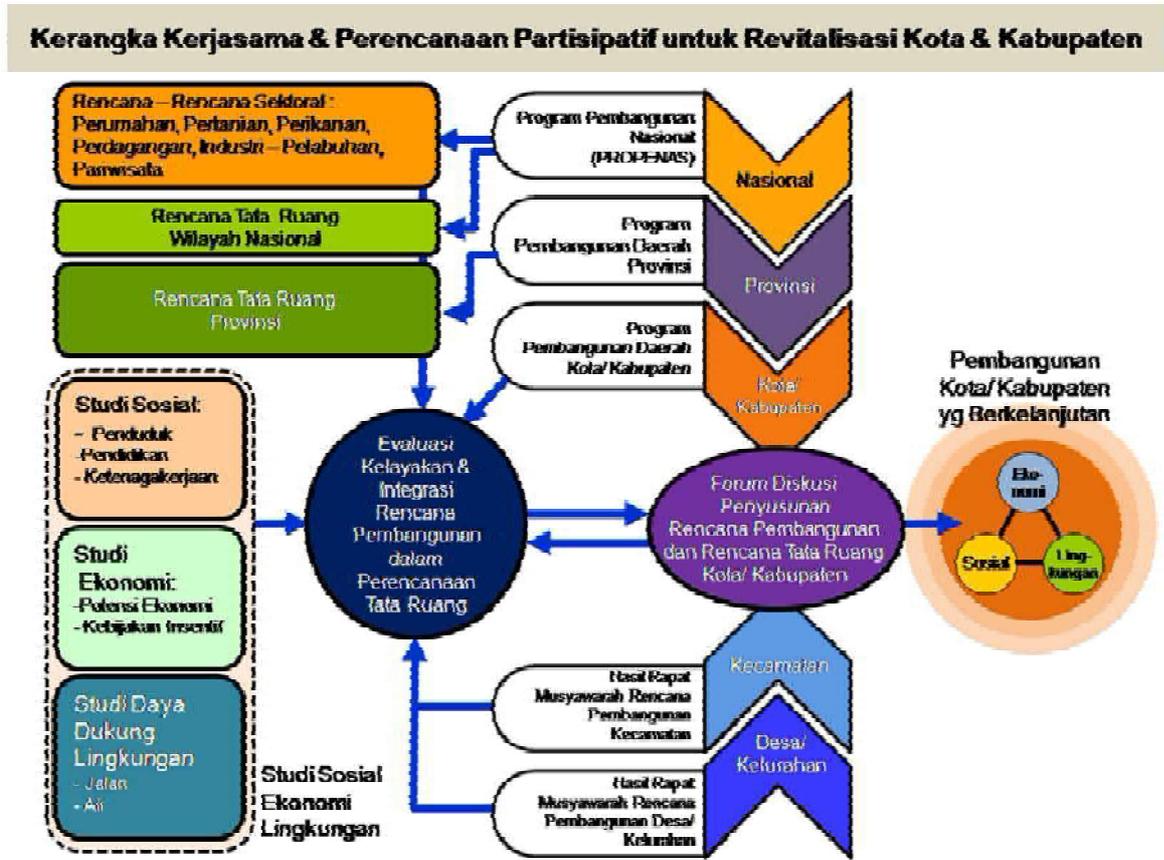
Studi sosial, ekonomi, dan lingkungan

sangat perlu dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Bentuk studi ini telah dilakukan di kabupaten Bangkalan oleh tim ini seperti disampaikan di bagian Analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif di atas.

Langkah evaluasi kelayakan dan integrasi rencana pembangunan dalam perencanaan tata ruang ini akan dilakukan oleh tim ahli yang membantu pemerintah daerah kota dan kabupaten. *Pertama*, tim ini akan mengevaluasi seluruh rencana pembangunan nasional, provinsi, kota atau kabupaten dll. yang sudah dirumuskan dahulu. Kemudian tim ini akan melakukan evaluasi apakah perencanaan ini masih bisa dilaksanakan secara layak di lokasi kota atau kabupaten, sesuai rekomendasi Tanuwidjaja dan Malone-Lee (2009).

Jika ditemui layak maka usulan-usulan ini akan dipertimbangkan lagi apakah memenuhi kerangka pembangunan berkelanjutan atau tidak. Selain itu, aspirasi masyarakat dan swasta dari bawah akan dipertimbangkan juga, apakah bisa selaras dengan rencana-rencana tersebut? Akhirnya semua rencana ini akan diintegrasikan sesuai rekomendasi Tanuwidjaja dan Widjaya (2010) dan ditawarkan pada forum diskusi.

Forum diskusi penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang kota/kabupaten akan dihadiri oleh seluruh *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan). Forum ini akan membahas dan



Gambar 9. Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif untuk Revitalisasi Kota dan Kabupaten

menyelaraskan keinginan dari bawah dan perencanaan pembangunan dari atas. Diharapkan agar dalam Forum ini bisa diambil keputusan yang dapat dirumuskan dalam rencana pembangunan yang terintegrasi untuk kota dan kabupaten. Langkah-langkah ini dideskripsikan secara visual pada Gambar 9 berikut.

Kerangka ini sudah disosialisasikan dalam diskusi dengan para ahli dan diskusi *stakeholders*. Tetapi ternyata kerangka ini belum bisa diterima karena penyebabnya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan

masyarakat. Karena itu diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan kerangka ini di masa depan.

Akibatnya sampai saat ini pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) dan Kabupaten Bangkalan belum terkoordinasi dengan optimal. Diamati juga dampak negatif berupa konflik sosial masih terjadi. Selain itu ditemui bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Bangkalan tidak ingin dibuka kepada publik oleh pemerintah daerah karena memperburuk citra kabupaten. Tetapi kebijakan yang ada dirasakan belum terintegrasi dan melibatkan

masyarakat secara partisipatif.

Kesimpulan

Kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif yang lebih jelas untuk mewujudkan pembangunan pulau Madura yang berkelanjutan, terutama di Kabupaten Bangkalan. Dan ditemukan bahwa Kabupaten Bangkalan ternyata memiliki karakter sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik.

Karena itu diusulkan beberapa rekomendasi yang terkait dengan revitalisasi rencana tata ruang kabupaten-kabupaten di Pulau Madura. Kemudian diusulkan pula peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Terakhir, diusulkan peningkatan infrastruktur jalan dan instalasi air baku dan distribusinya di Pulau Madura terutama untuk kawasan industri terpadu.

Strategi ini diusulkan bersamaan dengan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif. Sebuah integrasi tiga langkah usulan baru pada kerangka perencanaan nasional sampai lokal. Tiga langkah usulan yang baru ialah Studi Sosial Ekonomi Lingkungan; Evaluasi Kelayakan dan Integrasi Rencana Pembangunan dalam Perencanaan Tata Ruang serta Forum Diskusi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten.

Kerangka ini sudah disosialisasikan dalam diskusi dengan para ahli dan diskusi *stakeholders*. Tetapi ternyata kerangka ini belum bisa diterima karena penyebabnya terdapat

perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan masyarakat. Karena itu diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan kerangka ini di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), (1999), Atlas Sumber Daya Nasional-Peta Tanah Tahun 98/99.
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Jawa Timur dan Madura.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur, (2012), Jawa Timur dalam Angka 2012.
- Badan Pusat Statistik, (2009), Bangkalan dalam Angka 2008-2009.
- Badan Pusat Statistik-BAPENAS-UNDP, Indonesia Human Development Report, 2004.
- De Joonge, H. (1988), Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam, PT Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum (1998), Pedoman Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Pekerjaan Umum (PSD-PU), Jakarta.
- Eddy Juwono Slamet (1999), Madura Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, Sebuah Tinjauan Perilaku Ekonomi, disampaikan pada Seminar Nasional Teknik Elektro 1999, tanggal 27 Maret 1999, di Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya.

- Jacobs, J., (1961), *The Death and Life of Great American Cities*, New York: Random House and Vintage Books.
- Jacobs, J., (1969), *The Economy of Cities*, New York: Random House.
- Jacobs, J., (1984), *Cities and the Wealth of Nations*, New York: Random House, 1984.
- Jacobs, J., (1997), *Ideas That Matter: The Worlds of Jane Jacobs*, edited by Max Allen, Mohammad Adib (2009), *Ethnografi Madura*, Pustaka Intelektual Surabaya, Surabaya.
- Newman, P, dan Kenworthy, J., (2000), *Sustainable Urban Form: The Big Picture* dalam Williams K., Burton E., and Jenks M. (ed.), *Achieving Sustainable Urban Form*, E & FN Spon, London 2000.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, (1995), *Studi Neraca Air SWS Madura*.
- R. Soekardi Poespowardoyo & Hendri Setiadi, (1985), *Peta dan Laporan Hidrogeologi Lembar VIII-Surabaya, Jawa, Skala 1: 250.000*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung.
- Sanoff, H., (1991), *Visual Research Methods in Design*, Department of Architecture, School of Design and Environment, North Carolina University, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Start, D., Hovland. I., (2004), *Tools for Policy Impact: Handbook for Researchers*, Overseas Development Institute.
- Tanuwidjaja, G., Widjaya, J.M., (2010), *Integrasi Tata Ruang dan Tata Air untuk Mengurangi Banjir di Surabaya, untuk Seminar Nasional Arsitektur (di) Kota: "Hidup dan Berkehidupan di Surabaya"*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Tanuwidjaja, G., Malone-Lee, L.C., (2009), *Applying Integrated Ecological Planning and Adaptive Landscape Evaluation Tool for Developing Countries in the Framework of Sustainable Spatial Planning and Development*, Study Case Bintan Island, Indonesia, In International Seminar Positioning Planning in Global Crises, Bandung November 2009, Department of Regional and City Planning, School of Architecture, Planning and Policy Development, Institut Teknologi Bandung.
- Today, M.P., Smith, S.C., ed. (2003), *Economic Development*, 8th Edition, Pearson Education Limited, Essex, England.
- WCED, (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*, Chapter 2, *Towards Sustainable Development*, sumber: www.un-documents.net
- Williams, K. (2000), *Does Intensifying Cities Make them More Sustainable?* dalam Williams K., Burton E., and Jenks M. (ed.), *Achieving Sustainable Urban Form*, E & FN Spon, London 2000.

Website:

- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dalam <http://abuzadan.staff.uns.ac.id>;
http://en.wikipedia.org/wiki/FAO_soil_classification.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
<http://www.pps.org/articles/jjacobs-2>



Pedoman Penulisan Naskah

1. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4, Times New Roman 12 pt, spasi satu setengah, dengan panjang naskah 10 s.d. 15 halaman.
3. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan pada bagian akhir naskah setelah daftar pustaka.
4. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagai catatan kaki.
5. Judul artikel singkat dan jelas (maksimal 15 kata), diketik dengan huruf besar. Nama ilmiah dan istilah asing lainnya diketik dengan huruf miring.
6. Identitas penulis meliputi:
 - Nama lengkap penulis (tanpa gelar).
 - Nama dan alamat lembaga penulis.
 - Keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai nomor telepon, handphone, dan fax, serta alamat email.
 - Nomor rekening bank yang masih aktif.
7. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris). Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata yang ditulis dalam satu alinea yang mengandung ringkasan dari latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, maupun kesimpulan.
8. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud.
9. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium sepantasnya.

Naskah dikirim kepada redaksi Jurnal Pembangunan Daerah melalui email: jurnal@bangda.kemendagri.go.id atau ke alamat redaksi di Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750. Telp. (021) 7992537

Jurnal Pembangunan Daerah diterbitkan empat edisi dalam setahun oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan sebagai media referensi daerah membangun.

Jurnal ini kiranya berfungsi juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikan gagasan, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu pembangunan daerah dan desentralisasi.

ALAMAT REDAKSI:

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata
Jakarta Selatan 12750
Telp.: 021-7992537
Email: jurnal@bangda.kemendagri.go.id